

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia yang memainkan peran progresif dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai agama (Yaldi et al., 2024). Pondok pesantren secara umum beroperasi sebagai bisnis nirlaba. Dalam konteks ini, bisnis nirlaba merujuk pada operasional pesantren yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan meliputi pelayanan pendidikan dan keagamaan kepada masyarakat (Kurnia et al., 2023). Pondok pesantren beroperasi dengan prinsip-prinsip yang berpusat pada pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan kualitas individu. Dalam model ini, pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti donasi, zakat, infaq, dan wakaf, dialokasikan untuk mendukung program pendidikan, kegiatan keagamaan, serta pengembangan fasilitas pesantren. Perihal demikian, dengan mengadopsi model bisnis nirlaba pesantren menempatkan pemberdayaan sosial sebagai prioritas utama, mengabdikan kepada kebutuhan masyarakat, terutama dalam pendidikan agama dan umum. Hal ini mencerminkan visi pesantren sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan yang berkelanjutan. Pondok pesantren sebagai bisnis nirlaba tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang signifikan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pondok pesantren merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. *Good Corporate Governance* merupakan kerangka kerja yang mengatur cara perusahaan dijalankan secara efisien dan

bertanggung jawab. Perihal ini melibatkan praktik manajemen yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan (Syofyan, 2021). Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* mencakup keterbukaan dalam penyampaian informasi, pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan, perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, perlindungan kepentingan pemegang saham, dan kepatuhan terhadap hukum serta etika (Utama, 2022). Implementasi *Good Corporate Governance* membantu meningkatkan kinerja perusahaan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan berkualitas.

Akuntabilitas adalah aspek utama dari *Good Corporate Governance* yang menggarisbawahi pentingnya sebuah organisasi untuk bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambilnya (Solechan, 2021). Dalam konteks ini, akuntabilitas menuntut transparansi, integritas, dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan atau entitas lainnya (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Perihal tersebut berarti bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemimpin atau pengurus perlu dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Melalui prinsip akuntabilitas ini, sebuah organisasi memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang diakui secara universal, serta memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait bahwa kepentingan mereka dilindungi dan dihormati. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga fondasi untuk membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan jangka panjang dari suatu organisasi.

Penelitian mengenai analisis akuntansi pondok pesantren berbasis kekeluargaan dengan acuan *Good Corporate Governance* (GCG) masih belum pernah diteliti sebelumnya. Menurut (Muslimah, 2020) dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa perusahaan keluarga masih mengalami keterlambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, seperti *accountability* dan *responsibility*, yang dapat mempengaruhi kinerja dan valuasi perusahaan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk memberikan kebaruan pada ranah akuntansi dengan tujuan supaya penelitian ini berguna untuk referensi pada penelitian selanjutnya yang akan dilakukan. Mengkaji penelitian terdahulu dengan metode yang berbeda memiliki beberapa manfaat signifikan untuk penelitian yang akan dilakukan. Pertama, hal ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kelemahan dan kekurangan dari studi sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks yang berbeda. Kedua, dengan menggunakan metode yang berbeda, peneliti dapat memperluas pemahaman tentang topik tersebut dari perspektif baru, yang mungkin tidak terungkap dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akuntansi terkait GCG di pondok pesantren, tetapi juga menawarkan landasan yang lebih solid dan terperinci untuk penelitian di masa mendatang, sehingga mendukung pengembangan praktik akuntansi yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian relevan yang menjadi rujukan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Kirowati, dkk. pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyyah Kota Madiun”. Diketahui bahwa implementasi akuntabilitas pada pondok pesantren tersebut menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagaimana pedoman tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Perihal tersebut ketentuan yang diatur adalah penyajian laporan keuangan pondok pesantren, kebijakan

akuntansi, penyajian dan komponen laporan keuangan, serta materialitas dan periode pelaporan. Meninjau terhadap acuan Pedoman Akuntansi Pesantren, hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pada Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota Madiun belum dapat menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dengan baik. Kendala yang terjadi dalam implementasi akuntabilitasnya yakni berada pada sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam hal akuntansi. Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah Kota Madiun belum mencatat aset yang dimiliki dalam laporan keuangan, maka hal tersebut menyebabkan dalam laporan keuangannya belum mengalokasikan beban penyusutan pada asetnya.

Sehubungan dengan ranah penelitian yang sama, Reni Nur Safitri dan Maulidah Narasti pada tahun 2023 juga telah melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya”. Diketahui bahwa berdasarkan aturan pokok standarisasi ISAK 35 dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yayasan harus memenuhi lima indikator akuntabilitas dan empat indikator keberhasilan transparansi. Hal tersebut bertujuan agar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Pada praktiknya, Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya sudah bisa dikatakan akuntabel karena telah memenuhi empat dari lima indikator akuntabilitas, namun belum bisa dikatakan transparan karena dari empat indikator keberhasilan transparansi dan hanya ada dua indikator transparansi yang diterapkan. Laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fithrah Surabaya belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35. Tetapi jika dikaitkan dengan penerapan laporan keuangan yang sudah diolah menggunakan ISAK 35 bahwasanya laporan keuangan tersebut bisa diterapkan dalam laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, akan tetapi masih akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pihak IAI.

Penelitian mengenai akuntabilitas pondok pesantren memiliki cakupan yang luas apabila ditinjau berdasarkan pedoman yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis. Perihal tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai akuntabilitas pondok pesantren namun menggunakan acuan yang berbeda dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Ahmad Baehaqi, dkk. pada tahun 2023 telah melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren di Indonesia”. Diketahui bahwa bagian keuangan di Pondok Pesantren Darunnajah tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dan bertugas melakukan pencatatan transfer tunai atau bank melalui sistem *Darunnajah Smart System* dan aplikasi *B-Ware*. Laporan keuangan disusun oleh auditor internal Pondok Pesantren Darunnajah yang berlatar belakang akuntansi dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).

Merujuk kepada penelitian terdahulu yang membahas penerapan SAK ETAP, ISAK 35, serta PSAK 45 dalam konteks akuntansi pondok pesantren, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pendekatan komprehensif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di pondok pesantren. Penerapan *Good Corporate Governance* pada pondok pesantren menawarkan keuntungan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya mengatur aspek keuangan, tetapi juga mencakup seluruh spektrum manajemen dan operasional pesantren. Penerapan GCG meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan donatur. Selain itu, GCG memastikan bahwa keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan prinsip-prinsip etika dan bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas pesantren. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan

yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang pesantren.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohmah Pondok Pesantren Nurul Ulum merupakan salah satu pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pondok pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan agama dan umum bagi para santri yang tinggal dan belajar di dalamnya, didirikan pada tahun 1967 oleh almarhum KH. Ahmad Syifa yang bertujuan untuk mendidik putra putri Indonesia agar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta bangsa Indonesia serta dibina menjadi generasi yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah yang mempunyai keterampilan dalam mengisi pembangunan masyarakat dan negara terutama di dalam pendidikan dan dakwah. Yayasan ini merupakan pondok pesantren berbasis kekeluargaan sehingga manajemen pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang dikelola secara turun temurun. Perihal tersebut merupakan sebuah karakteristik yang tidak dimiliki oleh semua pondok pesantren di Indonesia.

Pondok pesantren berbasis kekeluargaan memiliki struktur manajemen yang unik dibandingkan dengan pondok pesantren umum. Pada pondok pesantren berbasis kekeluargaan, pengelolaan dan kepemimpinan sering kali diwariskan secara turun temurun di dalam keluarga pendiri. Nilai-nilai kekeluargaan sangat lekat dalam setiap aspek pengelolaan, sehingga hubungan antara pengurus, staf, dan santri lebih erat dan personal. Keputusan-keputusan penting biasanya diambil berdasarkan musyawarah keluarga, dan ada rasa tanggung jawab yang mendalam untuk menjaga warisan dan visi pendiri pesantren. Sebaliknya, pondok pesantren dengan manajemen pada umumnya lebih cenderung memiliki struktur organisasi yang formal dan profesional. Pengelolaan pesantren mungkin melibatkan pengurus yang dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan pengalaman, bukan berdasarkan

hubungan keluarga. Keputusan diambil melalui mekanisme yang lebih formal, dengan sistem hierarki dan tata kelola yang terstruktur. Manajemen yang lebih profesional ini memungkinkan adanya akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi, dengan prosedur dan kebijakan yang sesuai dengan standar organisasi modern. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam hal pengelolaan dan pengambilan keputusan, di mana pondok pesantren berbasis kekeluargaan lebih menekankan pada nilai-nilai tradisional dan hubungan personal, sementara pondok pesantren dengan manajemen pada umumnya fokus pada efisiensi, transparansi, dan profesionalisme.

Akuntabilitas dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) pada pondok pesantren berbasis kekeluargaan merupakan elemen penting yang memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengurus pesantren dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Aspek utama akuntabilitas dalam konsep GCG meliputi tanggung jawab pengelola, pelaporan keuangan, mekanisme evaluasi dan audit, keterlibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika (Wahyudi & Rosyidah, 2024). Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam GCG, pondok pesantren berbasis kekeluargaan dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas mereka di mata pemangku kepentingan. Perihal tersebut juga memastikan bahwa struktural organisasinya telah menjalankan operasionalnya dengan cara yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sehingga dapat terus berkontribusi pada pembangunan moral dan spiritual masyarakat secara efektif.

Keberlanjutan bisnis pada pondok pesantren berbasis kekeluargaan menjadi hal utama yang diharapkan oleh penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan adanya akuntabilitas yang kuat, pesantren dapat memastikan bahwa semua sumber daya dikelola dengan bijaksana dan transparan. Hal tersebut berguna untuk

meningkatkan kepercayaan dari donatur dan komunitas. Keberlanjutan bisnis juga diperkuat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan audit yang rutin, memungkinkan pesantren untuk terus menerima dukungan finansial yang stabil. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan menciptakan lingkungan yang inklusif dan partisipatif, yang mendorong rasa kepemilikan dan komitmen bersama terhadap tujuan jangka panjang pesantren. Dengan mematuhi standar etika dan hukum, pesantren dapat mengurangi risiko dan menghindari konflik yang dapat menghambat operasionalnya. Perihal tersebut berkontribusi pada keberlanjutan bisnis yang memungkinkan pondok pesantren berbasis kekeluargaan untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisional dan visi pendirinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti akuntabilitas pondok pesantren berbasis keluarga, yang memiliki karakteristik manajemen yang unik dibandingkan dengan pondok pesantren pada umumnya. Fokus penelitian ini adalah pada pondok pesantren yang dikelola sepenuhnya oleh anggota keluarga, berbeda dengan banyak pondok pesantren lain yang mengizinkan orang luar untuk menduduki posisi manajerial. Dengan mengeksplorasi bagaimana pondok pesantren berbasis keluarga mengelola akuntabilitas dalam operasionalnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keunggulan dan tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren jenis ini, serta bagaimana mereka dapat mempertahankan kepercayaan dan dukungan dari komunitasnya.

Sebagaimana merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada analisis akuntabilitas dalam pengelolaan pondok pesantren nirlaba berbasis kekeluargaan untuk keberlanjutan bisnis yang mengacu pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui studi

kasus yang dilakukan pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang, diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian berupa gambaran yang jelas mengenai strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai kemandirian finansial dalam hal keberlanjutan bisnis pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana sistem akuntabilitas pondok pesantren berbasis kekeluargaan untuk keberlanjutan bisnis pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang?”

C. Batasan Masalah

Supaya menghindari luasnya permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan permasalahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni berfokus pada analisis akuntabilitas dalam pengelolaan pondok pesantren nirlaba berbasis kekeluargaan untuk keberlanjutan bisnis yang mengacu pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pondok pesantren berbasis kekeluargaan untuk keberlanjutan bisnis pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Malang serta menambah wawasan bagi mahasiswa dalam menambah ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas pondok pesantren berbasis kekeluargaan untuk keberlanjutan bisnis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem akuntabilitas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Serta temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model bisnis nirlaba yang berkelanjutan pada Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Malang.

